

DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP KEMISKINAN DI INDONESIA

Herlina Tarigan¹, Juni H. Sinaga¹, Rika R. Rachmawati¹

Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Jln. Tentara Pelajar No.3B, Bogor 16111

Korespondensi penulis: herlin4@yahoo.com

PENDAHULUAN

Sejak Maret 2015 tren perubahan angka kemiskinan nasional konsisten menurun dan menunjukkan pencapaian prevalensi kemiskinan angka satu digit 9,82% pada tahun 2018. Pencapaian ini pertama sekali dalam sejarah Indonesia dan secara politis dinilai sebagai prestasi pembangunan yang luar biasa. Perlambatan penurunan tingkat kemiskinan menunjukkan bahwa penurunan kemiskinan semakin lama semakin sulit (*the last mile problem*), tetapi strategi pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan pemerintah dinilai berhasil (Abdullah 2020; Tarigan et al. 2019). Namun demikian, jumlah penduduk Indonesia yang menderita kemiskinan masih cukup besar, mencapai 25,67 juta jiwa atau 9,66% dari jumlah penduduk pada September 2018.

Permasalahan utama dalam penanganan kemiskinan di Indonesia adalah belum berhasilnya penanggulangan kemiskinan di pertanian dan perdesaan. Jumlah penduduk miskin di desa jauh lebih besar dibandingkan dengan penduduk miskin di kota. Basis ekonomi desa umumnya pertanian, sehingga pengurangan kemiskinan pada rumah tangga pertanian dipercaya sebagai kunci mewujudkan penurunan angka kemiskinan nasional (Simatupang dan Dermorejo 2003; Suryahadi et al. 2006; Tarigan et al. 2019). Salah satu penyebab kemiskinan yang tidak sering dibahas adalah bencana atau wabah penyakit. Wabah virus corona yang lebih dikenal dengan pandemi Covid-19 telah mengguncang dunia sejak akhir tahun 2019. Pandemi

¹ Kontributor utama

ini menyebar secara global meliputi area geografis yang luas. Pada awal Maret 2020, Covid-19 masuk ke Indonesia dengan jumlah terinfeksi yang terus meningkat dan wilayah sebaran yang semakin meluas, sehingga dinyatakan sebagai bencana nasional nonalam.

Pemberlakuan berbagai kebijakan dalam rangka mengatasi penyebaran atau upaya memutus rantai penyebaran Covid-19 mengakibatkan banyak kegiatan ekonomi yang mengalami kontraksi bahkan terhenti berproduksi. Hal ini mengakibatkan terjadinya peningkatan pengangguran, penurunan tingkat produktivitas individu maupun perusahaan, dan mendorong munculnya orang miskin baru yang secara agregat meningkatkan jumlah penduduk miskin (Izzati 2020; Suryahadi et al. 2020). Sehubungan dengan itu, pemerintah perlu mengupayakan penanggulangan kemiskinan, baik yang sifatnya jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang (Yusuf 2020).

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dampak pandemi Covid-19 terhadap kemiskinan di Indonesia. Kajian akan difokuskan pada empat aspek: pertama, perkembangan kemiskinan dilihat dari jumlah, prevalensi, indeks kedalaman, dan keparahan kemiskinan secara nasional maupun wilayah; kedua, sebaran kemiskinan; dan ketiga, bagaimana dampak pandemi Covid-19 terhadap kemiskinan dan respons kebijakan. Aspek pertama, kedua, dan ketiga akan dipakai sebagai pembelajaran untuk aspek keempat, yaitu merumuskan saran kebijakan upaya penanggulangan kemiskinan.

METODE

Kemiskinan diukur dari kemampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Pendekatan ini memandang kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi sehingga status kemiskinan diukur menurut garis kemiskinan (GK), yakni kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Dengan demikian, pendapatan yang menentukan daya beli dan harga barang konsumsi menjadi faktor penting dalam menentukan jumlah dan posisi kemiskinan. Perkembangan kemiskinan antarwilayah maupun antarsektor tidak sama akibat perbedaan faktor

sumber daya, aksesibilitas terhadap teknologi informasi, kesempatan kerja, dan keterjangkauan program pembangunan yang berbeda (Tarigan et al. 2019; Todaro dan Smith 2006). Pandemi Covid-19 yang mengglobal diduga berdampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat, sehingga menjadi cukup menarik untuk mencoba mengkaji dampak pandemi terhadap kemiskinan di Indonesia.

Tulisan ini menggunakan data kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS) periode tahun 2015–2020. Analisis dampak pandemi akan menyoroti data bulan Maret 2019 hingga Maret 2020, periode ketersediaan data sejak terjadinya pandemi. Diakui bahwa tulisan ini memiliki kelemahan untuk melihat dampak yang diakibatkan data yang masih sangat singkat. Pengayaan hasil olahan data dilakukan dengan *review* ilmiah hasil-hasil penelitian terkait dan berdiskusi dengan *key informan* yang mendalami masalah kemiskinan. Tulisan dinarasikan dengan sistematika yang sejalan dengan tujuan kajian dan ditutup dengan saran rekomendasi kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Kemiskinan Nasional, Desa-Kota, dan Wilayah Provinsi

Kecenderungan jumlah penduduk miskin periode Maret 2015 sampai September 2019 konsisten turun secara melandai dari 28,59 juta jiwa menjadi 24,79 juta jiwa. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2018 sekitar 25,95 juta jiwa, menurun sebesar 280 ribu jiwa pada September 2018, menurun lagi sebesar 530 ribu jiwa sampai Maret 2019 dan 350 ribu jiwa pada September 2019. Dengan penggalan semester yang sama, jumlah penduduk miskin di perkotaan turun sebesar 13,1 ribu, 530 ribu, dan 137 ribu jiwa, sedangkan di perdesaan turun masing-masing 262,1 ribu, (27 ribu), dan 880 ribu jiwa. Jumlah penduduk miskin di perkotaan mulai meningkat sejak Maret 2019, sedangkan jumlah penduduk miskin di perdesaan pada periode Maret 2019 hingga September 2019 mengalami penurunan.

Berdasarkan prevalensinya, data BPS (2018, 2019) mencatat persentase kemiskinan di perkotaan konsisten turun dari 7,07% poin pada Maret 2018 menjadi 6,56% poin pada September 2019. Prevalensi di perdesaan turun dari 13,20% poin pada Maret 2018 menjadi 12,6 pada September 2019. Penurunan angka kemiskinan di perdesaan sedikit lebih besar dari perkotaan, tetapi jika dilihat dari jumlah, penduduk miskin perdesaan masih jauh lebih tinggi dibanding penduduk miskin perkotaan.

Pada periode September 2019 hingga Maret 2020 terjadi arah yang berlawanan dengan jumlah dan prevalensi kemiskinan baik di perkotaan, perdesaan, maupun nasional menunjukkan angka meningkat. Peningkatan jumlah penduduk miskin masing-masing 1.300 ribu, 333 ribu, dan 1.630 ribu jiwa atau peningkatan prevalensi 0,82% poin, 0,22% poin, dan 0,56% poin. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 mencapai 26,42 juta jiwa atau meningkat 1,63 juta jiwa (9,78%). Berdasarkan wilayahnya, peningkatan kemiskinan di perkotaan jauh lebih tinggi dibandingkan peningkatan di perdesaan. Disparitas kemiskinan antarwilayah perkotaan dan perdesaan masih cukup tinggi (Gambar 1).

Perkembangan kemiskinan berdasarkan provinsi, jumlah penduduk miskin terbanyak sepanjang periode Maret 2018 sampai September 2019 berada di Pulau Maluku dan Papua, mencapai 20,98% dari total penduduk setempat, sedangkan di Pulau Jawa hanya 8,79%. Pada bulan Maret 2020 tercatat lonjakan jumlah penduduk miskin secara nasional menjadi 26,42 juta jiwa, sebagian besar (13,3 juta) berada di Pulau Jawa. Data BPS menunjukkan jumlah penduduk miskin terkecil terdapat di Pulau Kalimantan, sebanyak 0,98 juta jiwa (Gambar 2).

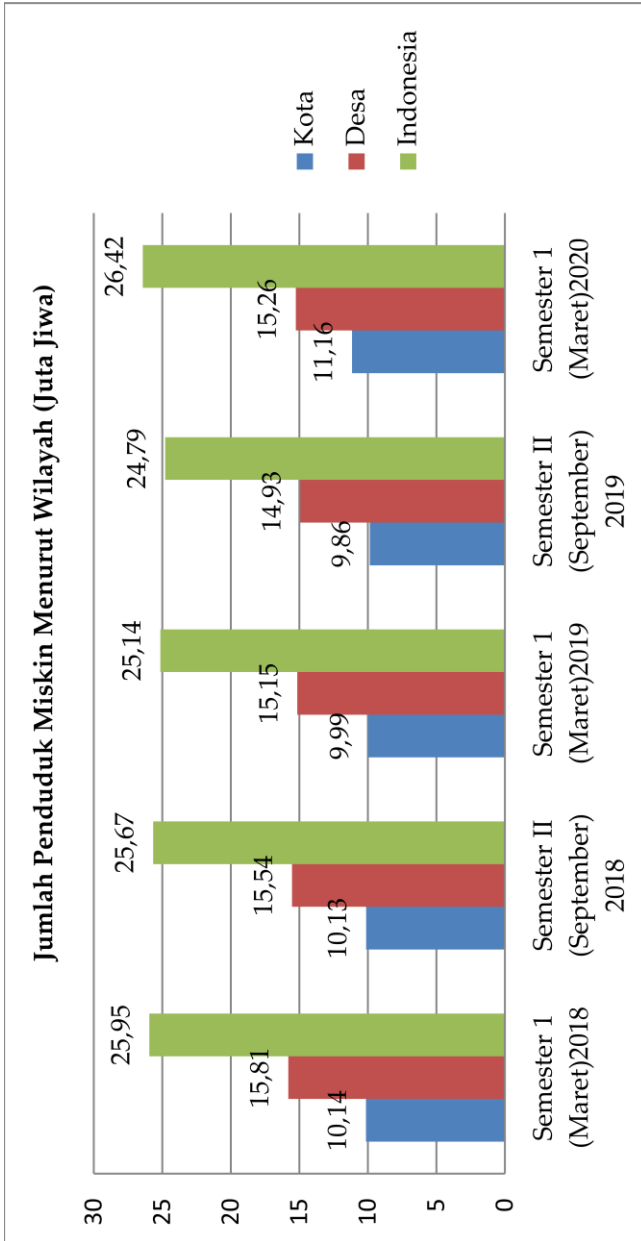
Pertambahan jumlah penduduk miskin selama periode September 2019 sampai Maret 2020 tercatat 1,5 juta jiwa. Jumlah terbesar terdapat di Pulau Jawa yang berubah status dari kategori rentan miskin menjadi miskin. Di antara enam provinsi di Pulau Jawa, Provinsi DKI Jakarta terkena dampak pandemi Covid-19 paling cepat dan besar yang mengakibatkan kenaikan jumlah penduduk miskin sebesar 1,11%, yakni dari 3,42% pada September 2019 menjadi 4,53% pada

Maret 2020, atau sekitar 480,86 ribu jiwa setara dengan 4,53% dari total penduduk DKI Jakarta. Angka ini naik 115 ribu atau 1,06% dibandingkan dengan kondisi pada tahun sebelumnya.

Menurut data BPS (2020a), setelah DKI Jakarta, berturut-turut Provinsi DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Banten, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Jambi, Kepulauan Riau, NTB, NTT, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Papua mengalami dampak pandemi Covid-19 cukup besar. Seluruh wilayah ini diduga mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin dengan intensitas yang berbeda.

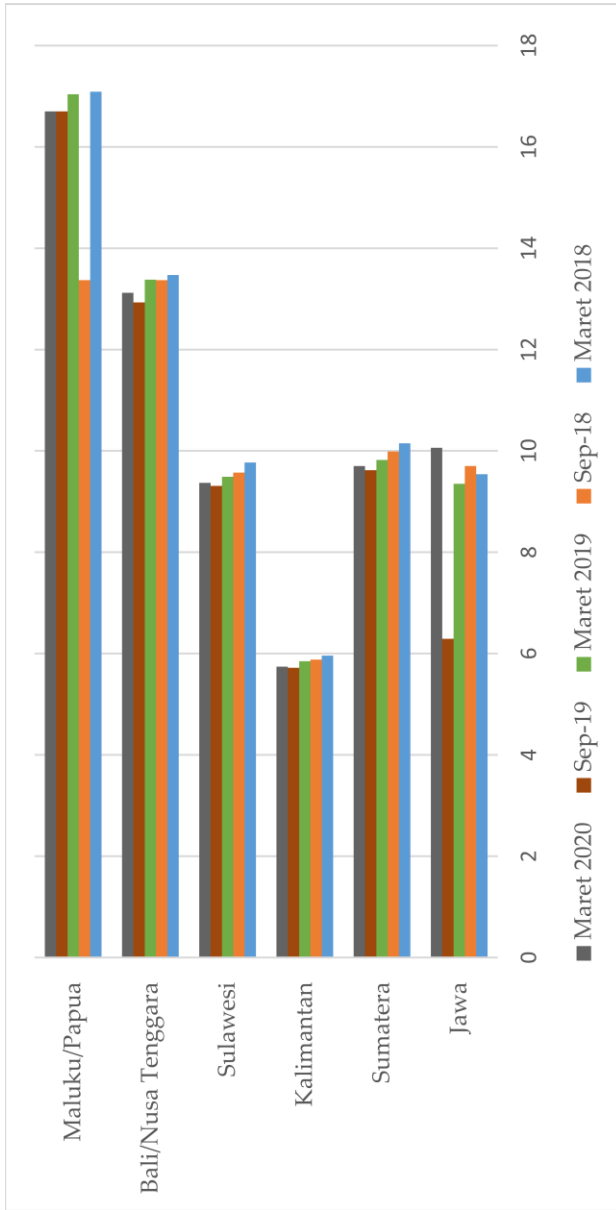
Permasalahan kemiskinan tidak hanya sekedar menghitung persentase dan jumlah penduduk miskin. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah mengenai tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap GK. Semakin tinggi nilai P1, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari GK. Melalui indeks keparahan kemiskinan (P2) akan tergambar penyebaran pengeluaran kebutuhan penduduk miskin jadi jika nilai P2 maka semakin tinggi pula ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Pada periode September 2019–Maret 2020, P1 dan P2 mengalami peningkatan. P1 pada September 2019 sebesar 1,50 naik menjadi 1,61 pada Maret 2020. Angka ini sedikit di bawah angka P1 September 2018, namun masih di bawah P1 Maret 2018. Demikian juga dengan P2 pada periode yang sama mengalami peningkatan dari 0,36 menjadi 0,38 (Gambar 3 dan 4). Relevan dengan peningkatan jumlah dan prevalensi kemiskinan pengaruh adanya pandemi, rata-rata pengeluaran masyarakat miskin cenderung semakin jauh dari GK dan ditandai dengan jatuhnya kelompok rentan miskin (buruh dan pekerja sektor informal) menjadi miskin dan masyarakat miskin menjadi semakin miskin. Pandemi Covid-19 memperdalam dan memperparah kemiskinan.



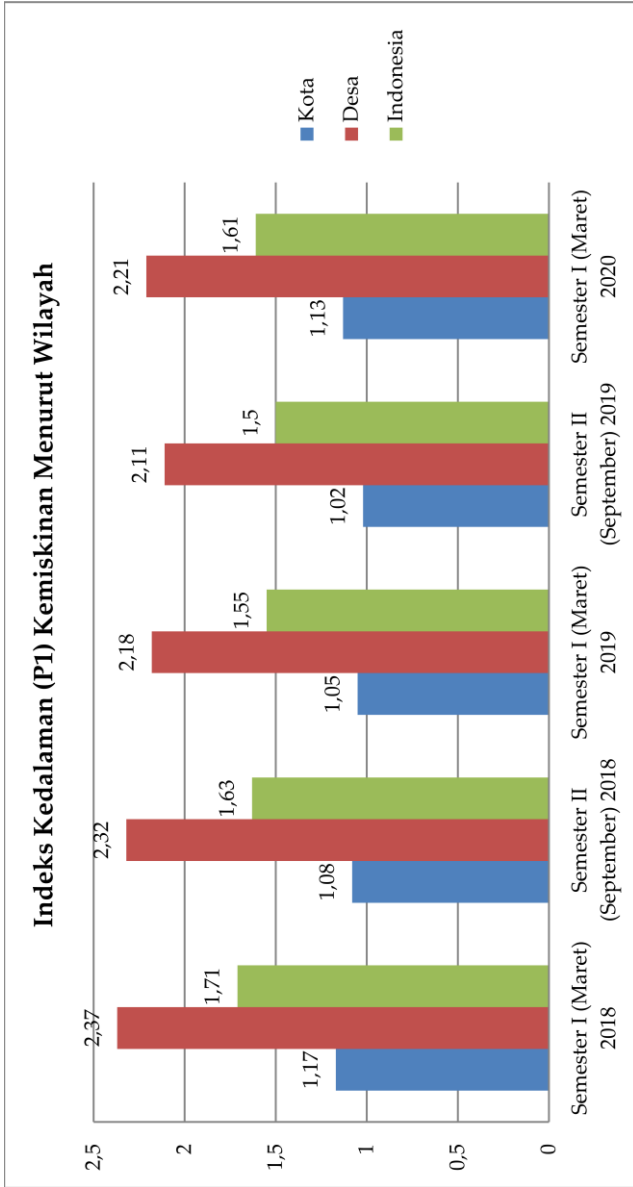
Sumber: BPS (2020a)

Gambar 1. Prevalensi kemiskinan menurut wilayah desa-kota, Maret 2018–Maret 2020



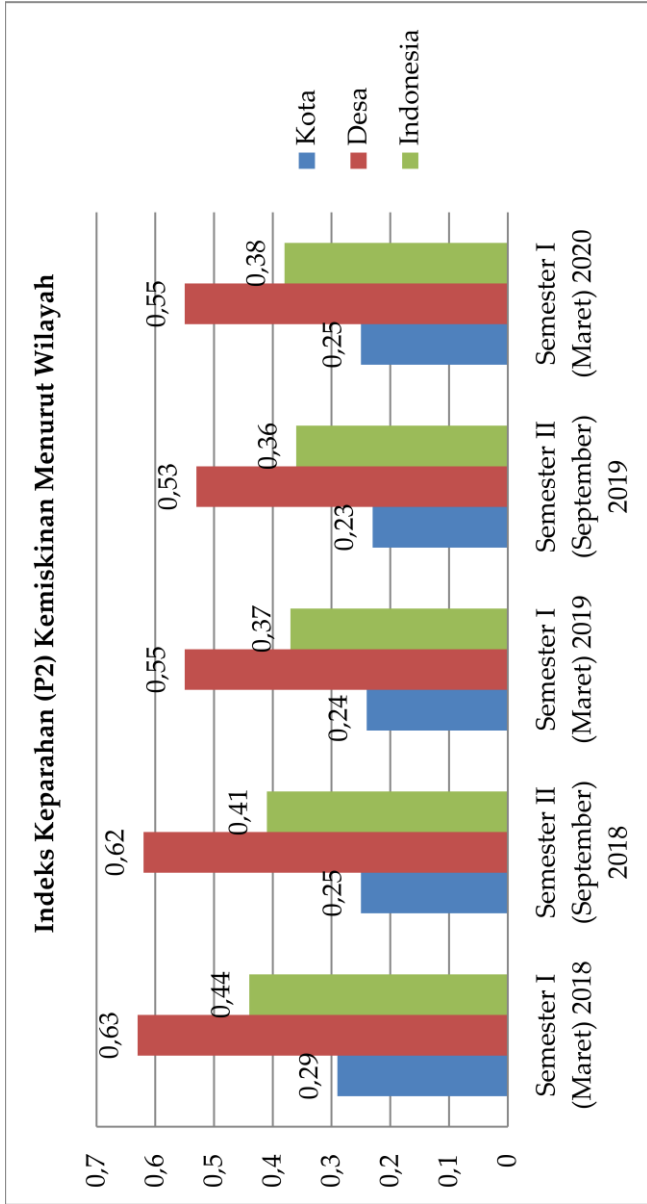
Sumber: BPS (2020a)

Gambar 2. Persebaran penduduk miskin menurut pulau, Maret 2018–Maret 2020



Sumber: BPS (2020a)

Gambar 3. Indeks kedalaman (P1) kemiskinan menurut wilayah desa-kota, Maret 2018–Maret 2020



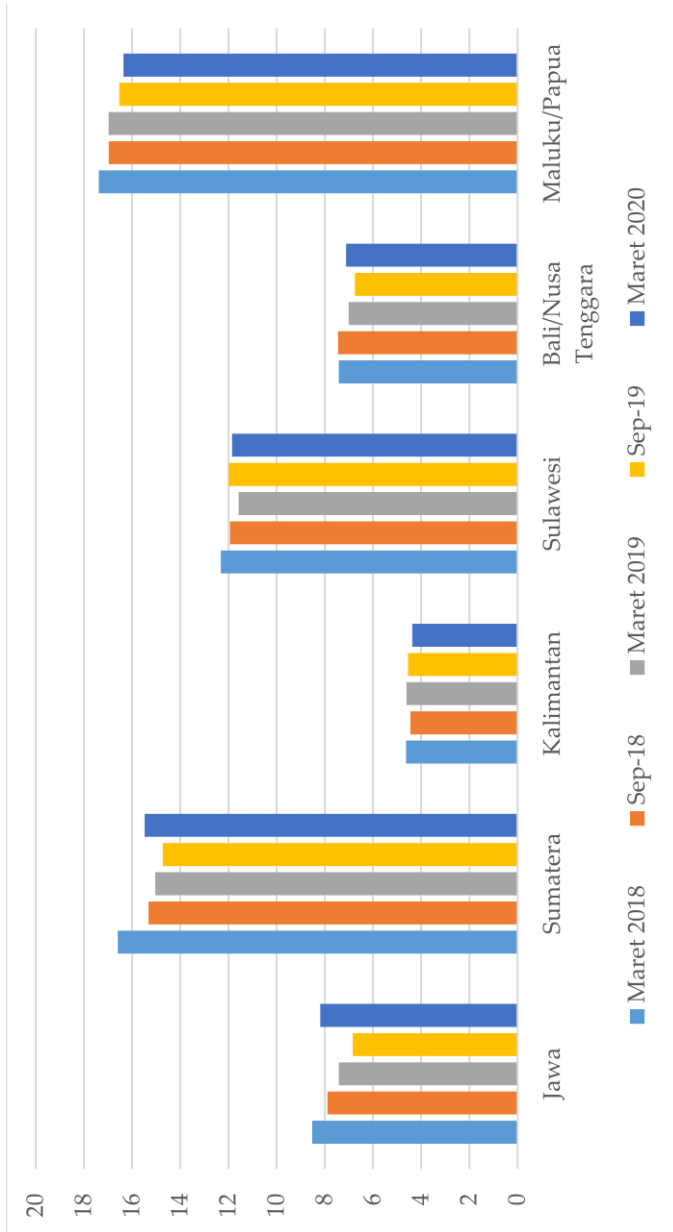
Sumber BPS (2020a)

Gambar 4. Indeks keparahan (P2) kemiskinan menurut wilayah desa-kota, Maret 2018–Maret 2020

Sejalan dengan P1 dan P2 nasional, pada periode Maret 2018 sampai September 2019, P1 dan P2 di kota dan di desa turun secara konsisten. Penurunan P1 dan P2 desa lebih besar dari pada kota. Demikian halnya pada periode September 2019 sampai Maret 2020, P1 dan P2 desa maupun kota mengalami kenaikan cukup signifikan, terutama di kota. Artinya, pada tahap awal pandemi, masyarakat perkotaan lebih cepat dan lebih besar terkena dampak.

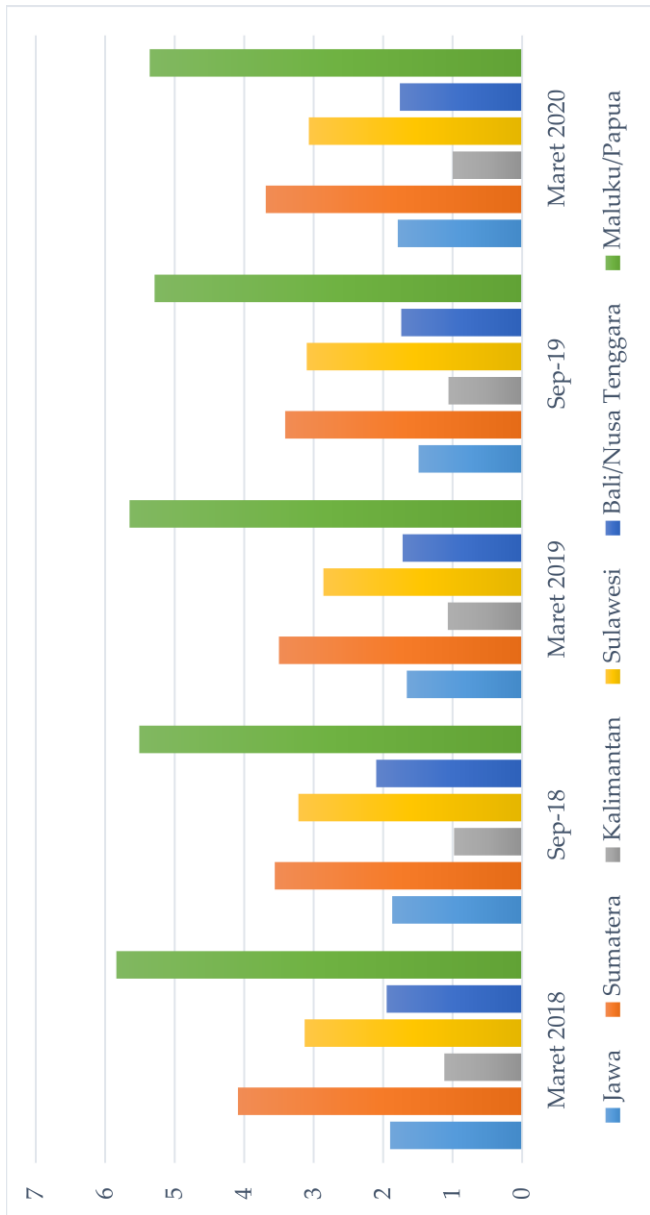
Sama dengan tingkat nasional dan desa-kota, permasalahan kemiskinan pada tingkat provinsi tidak memadai digali hanya dari sisi jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi tingkat kedalaman (P1) dan tingkat keparahan (P2) kemiskinan akan memperjelas dan mempertegas perkembangan kemiskinan yang lebih bermakna. Data BPS menunjukkan bahwa pada bulan Maret 2018 hingga Maret 2020, P1 tertinggi berada di Provinsi Papua (6,16%), Papua Barat (5,79%), Nusa Tenggara Timur (4,02%), dan Nusa Tenggara Barat (2,58%) (BPS 2020a). P1 meningkat dari 2,11% pada September 2019 menjadi 2,21% pada Maret 2020. Tingginya P1 di beberapa daerah ini menggambarkan rata-rata pengeluaran orang miskin semakin senjang terhadap GK. Dengan kata lain, masyarakat miskin yang berada di provinsi ini berada dekat dengan GK, dan apabila terjadi gejolak ekonomi penduduknya akan menjadi lebih miskin dan kerentanannya lebih tinggi dibanding dengan penduduk di provinsi lain (Gambar 5). Faktor yang menjadi penyebab tingginya P1 di daerah ini adalah ketidakberdayaan akibat keterbatasan akses infrastruktur yang menunjang. Sebagai contoh, Provinsi Papua misalnya, hanya 23% desa yang dapat mengakses jalan aspal/beton dari/ke lokasi sentra produksi pertanian. Penyebab lain adalah rendahnya tingkat produktivitas dan tingginya angka pengangguran. Di Provinsi Papua dan Papua Barat, hanya sedikit desa yang memiliki produk unggulan yang memiliki nilai jual (Bappenas 2020).

Pada periode bulan Maret 2018 hingga September 2019, provinsi-provinsi di Pulau Maluku/Papua dan Pulau Sumatera memiliki P2 tertinggi (Gambar 6). Setelah merebaknya pandemi, data bulan Maret 2020 menunjukkan bahwa nilai P2 tertinggi berada di Provinsi Papua (2,08%) dan Papua Barat (2,06%). Tingginya nilai P2 di daerah ini



Sumber: BPS (2020a)

Gambar 5. Indeks kedalamanan kemiskinan menurut provinsi, Maret 2018–Maret 2020



Sumber: BPS (2020a)

Gambar 6. Indeks keparahan kemiskinan menurut pulau, Maret 2018–Maret 2020

mengindikasikan tingginya ketimpangan pengeluaran antarpenduduk miskin. Semakin tinggi P2 berimplikasi pada semakin membesarnya ketimpangan pengeluaran untuk kebutuhan hidup, baik primer maupun sekunder.

Sehubungan dengan adanya pandemi Covid-19, perkembangan kemiskinan (jumlah, kedalaman, keparahan) sangat dipengaruhi oleh pendapatan dan GK. Pengurangan pendapatan karena pengurangan waktu kerja, kehilangan pekerjaan, dan kehilangan usaha memberi pengaruh lebih besar terhadap kemiskinan. GK beranjak lebih sedikit akibat harga-harga yang relatif tidak meningkat. Namun karena pendapatan menurun, daya beli melemah, terlebih lagi masyarakat membutuhkan biaya pengobatan dan tambahan konsumsi vitamin agar memiliki imun tubuh yang mampu bertahan dari pengaruh Covid-19.

GK Maret 2020 sebesar Rp454.652 per kapita per bulan dan mengalami kenaikan 3,20% dibandingkan September 2019. Peranan komoditas makanan terhadap GK masih sangat besar yakni 73,86% (BPS 2020a). Secara berturut-turut di perkotaan dan perdesaan, lima komoditas penyumbang terbesar adalah beras 20,22 dan 25,31%, rokok kretek filter 12,16 dan 10,98%, telur ayam ras 4,30 dan 3,72%, daging ayam ras 4,13 dan 2,43%, serta mi instan 2,34 dan 2,12%. Kecuali beras, sumbangan semua komoditas lainnya lebih besar di perkotaan dibandingkan dengan di perdesaan. Komoditas bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK perkotaan dan perdesaan adalah perumahan, bensin, listrik, pendidikan, dan perlengkapan mandi.

Penduduk miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah GK yang merupakan suatu garis yang menunjukkan nilai harga dari kebutuhan dasar. Pada tahun 2020, termasuk selama terjadi pandemi, harga-harga barang konsumsi tidak banyak mengalami kenaikan. Pada saat BPS mengumumkan terjadinya inflasi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dari triwulan ke triwulan negatif dan akhirnya menyebabkan Indonesia memasuki zona resesi ekonomi, kenaikan harga-harga tidak terjadi. Namun, bila persoalan pandemi Covid-19 belum dapat diatasi, maka sangat mungkin terjadi pertumbuhan

ekonomi yang terus negatif, potensi Indonesia mengalami depresi dengan harga bahan makanan melambung, serta ekonomi masyarakat yang melemah dengan daya beli menurun.

Sebaran Kemiskinan di Indonesia

Wilayah-wilayah di Indonesia memiliki jumlah dan persentase kemiskinan yang beragam, dengan tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan bervariasi. Informasi ini penting untuk merencanakan upaya apa yang harus dilakukan untuk menanggulangnya. Apabila ada kebijakan untuk mengalokasikan anggaran sebagai bentuk program penanggulangan kemiskinan, jumlah penduduk miskin, prevalensi kemiskinan, indeks kedalaman, dan indeks keparahan kemiskinan haruslah dipertimbangkan. Perlu menghindari proses penyeragaman dalam merancang dan melaksanakan program karena tidak akan efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan.

Secara konsisten, data potret kemiskinan menunjukkan jumlah penduduk miskin Indonesia sebagian besar ada di perdesaan (kecuali di Provinsi DKI Jakarta). Jika dilihat menurut pulau, jumlah terbesar berada di Pulau Jawa. Pada tahun 2018, data BPS mencatat masing-masing provinsi memiliki lebih dari 3 juta jiwa penduduk miskin. Namun prevalensi kemiskinan tertinggi (penduduk miskin lebih dari 20% jumlah penduduk) terdapat di wilayah Timur Indonesia, yakni Provinsi NTT, Papua, dan Papua Barat (Bappenas 2018). Penyebab utama faktor keterisolasian secara topografi dan telekomunikasi, faktor ketidakberdayaan akibat akses teknologi yang rendah, dan faktor dominan masyarakatnya hidup dari sektor pertanian tetapi tidak memiliki produk unggulan (Bappenas 2018, 2020). Tingginya bencana alam dan perubahan iklim turut memengaruhi karena seringkali merusak lahan pertanian, perumahan, dan fasilitas umum.

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan peningkatan persentase penduduk miskin pada sebagian besar provinsi di Indonesia. Data BPS menyebutkan bahwa pada Juni 2020, sekitar 22 dari 34 provinsi sudah terdampak (Herman 2020). Dampak terbesar terjadi di Jawa dan Bali berturut-turut provinsi DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Banten. Dampak tercepat dan terbesar

terdapat di wilayah perkotaan (7,49%), utamanya pusat-pusat bisnis, baik industri, perdagangan, jasa transportasi hingga pariwisata. Wilayah perdesaan hanya sekitar 6,56%. Proses transmisi melalui paparan dan hambatan sosial, menyebabkan berkurang atau hilangnya waktu bekerja, serta penurunan produktivitas individu yang berakibat penurunan pendapatan dan daya beli. Selanjutnya, kelompok rawan miskin mengalami penurunan pendapatan dan sebagian besar jatuh menjadi miskin, sementara kelompok miskin menjadi lebih miskin.

Kemiskinan akibat adanya pandemi terus menyebar antarkelompok masyarakat. Kelompok yang paling terdampak adalah masyarakat yang bekerja atau berusaha di sektor informal, diikuti sektor industri akibat terhambatnya produksi, sektor jasa transportasi akibat kebijakan PSBB, dan anjuran tinggal di rumah. Selanjutnya, dampak pandemi ini semakin terasa di sektor pertanian. BPS menginformasikan bahwa 70,53% penduduk berpenghasilan rendah mengalami penurunan pendapatan, sisanya adalah penduduk berpenghasilan menengah dan tinggi.

Wabah Covid-19 telah memukul industri pariwisata dalam negeri. Sektor ini bisa dikategorikan terdampak di awal, baik dari faktor global maupun lokal. Ketika beberapa negara memberlakukan *lockdown* dan larangan kunjungan wisatawan asing, terjadi penurunan tajam jumlah wisatawan domestik dan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia. Lapangan usaha langsung terdampak pada sektor pariwisata, yaitu sektor perdagangan, reparasi mobil dan sepeda motor; sektor transportasi dan pergudangan; serta sektor penyedia akomodasi dan makan minum. Sektor pertanian termasuk dalam kategori yang memiliki resiliensi tinggi, terdampak pada fase lebih akhir. Pada kuartal II-2020, saat sebagian sektor tumbuh negatif, sektor pertanian bisa tumbuh sebesar 2,15% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Tingginya arus balik migran ke perdesaan dan kebijakan pembatasan sosial telah menyebabkan terjadinya penurunan penanganan usaha tani dan hambatan distribusi serta pemasaran produksi yang berakibat turunnya gairah bertani. Konsekuensinya adalah terjadinya penurunan produktivitas yang diikuti oleh penurunan pendapatan dan konsumsi rumah tangga.

Dampak Pandemi terhadap Kemiskinan dan Respons Kebijakan

Berdasarkan data BPS yang diurai sebelumnya, dampak pandemi Covid-19 sebenarnya sudah mulai terasa di Indonesia sekalipun kasus terinfeksi belum ditemukan. Hal ini terjadi karena dampaknya bersifat global, kebijakan *lockdown* di negara-negara yang sudah lebih dahulu terkena wabah telah memberi pengaruh terhadap perdagangan internasional, penarikan dan atau penundaan investasi, tertekannya kegiatan pariwisata, bahkan menyebabkan banyak buruh migran di luar negeri kembali atau diturunkan gajinya yang secara langsung mengurangi pengiriman uang (*remittances*). Dampak ini semakin besar dan meluas ketika pandemi terjadi dan menyebar dengan cepat. Beberapa kali pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial bahkan melakukan *lockdown* terhadap beberapa perkantoran, pusat perbelanjaan, dan sejumlah kluster lainnya. Kondisi ini telah menekan sebagian besar kegiatan ekonomi.

Pandemi Covid-19 memberi dampak pada seluruh lapisan masyarakat terutama kelompok berpendapatan rendah, melalui mekanisme kombinasi guncangan penawaran dan permintaan yang menyebabkan penurunan kegiatan produktif, pengurangan pendapatan, dan akhirnya penekanan pertumbuhan ekonomi. Makroekonomi ini berdampak pada penurunan rata-rata pengeluaran per kapita di tingkat rumah tangga. Secara bertahap keluarga kehilangan penghasilan dan berpengaruh pada daya beli atau konsumsi rumah tangga (Bappenas 2020). BPS mencatat, penduduk rentan miskin yang bekerja di sektor informal jatuh menjadi miskin dengan jumlah mencapai 12,15 juta orang (BPS 2020b). Akibat kehilangan pekerjaan dan pendapatan, banyak masyarakat kota bergerak kembali ke desa.

Jika dilihat dari sisi waktu, provinsi di Jawa dan Bali sebagai pusat-pusat bisnis, perdagangan, dan wisata mendapat dampak lebih awal. Kelesuan memukul kuat sektor informal, menekan kegiatan produktif industri maupun jasa, selanjutnya berdampak ke sektor-sektor lain termasuk sektor pertanian. Pada triwulan pertama Maret–Mei 2020, hotel, restoran, jasa transportasi dan perdagangan besar dan kecil paling terkena dampak. Bulan Maret 2020, ketika ada WNI terinfeksi, penyebaran Covid-19 berlangsung cepat dan meluas. Pemerintah

telah menetapkan pandemi virus Covid-19 ini sebagai bencana nasional nonalam yang membuat dikeluarkannya kebijakan PSBB dan anjuran untuk tetap di rumah. Dampaknya, perekonomian nasional menjadi lumpuh, terjadinya pengurangan karyawan, dan akhirnya pertumbuhan ekonomi melambat dan meningkatnya angka dan prevalensi kemiskinan. Pada akhirnya, dampak pandemi berupa penurunan pendapatan dan daya beli.

Penurunan pendapatan terjadi akibat berkurangnya lapangan kerja, hambatan waktu kerja, penurunan upah, dan penurunan produktivitas kerja. Bagi penduduk yang berusaha di sektor industri, perdagangan, dan pertanian, penurunan pendapatan terjadi karena adanya hambatan waktu kerja akibat pembatasan mobilitas maupun hambatan pemasaran produksi, baik domestik maupun ekspor. Sebagian penduduk mengalami penurunan pendapatan karena penurunan pengiriman uang (remiten) dari anggota keluarga migran akibat mengalami gangguan pendapatan di kota atau negara tempatnya bekerja. World Bank (2020a) menyebut kejadian ini sebagai penurunan pendapatan tenaga kerja dan nontenaga kerja. Pembatasan sosial telah mengubah perilaku masyarakat dalam berbagai kegiatan, seperti mengurangi pertemuan, pesta, perjalanan, dan memilih berbelanja secara daring/*online*. Akibatnya, penyewaan gedung, pemesanan catering, percetakan, pelayanan transportasi, dan lainnya menjadi kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan. Hasil survei BPS (2020b) mencatat 62,60% responden yang bekerja di sektor transportasi dan pergudangan mengalami penurunan pendapatan.

Konsekuensi logis penurunan pendapatan adalah menurunnya daya beli, terutama untuk memenuhi kebutuhan bahan makanan dan nonmakanan. Bagi masyarakat miskin, sebagian besar pendapatan diperuntukkan untuk membeli pangan sehingga penurunan pendapatan berimplikasi terhadap penurunan pemenuhan pangan. Hal ini masih ditambah oleh adanya peningkatan pengeluaran biaya pengobatan atau pembelian vitamin untuk menjaga atau mengobati resiko wabah Covid-19, perubahan sistem belajar siswa jarak jauh dengan daring telah secara otomatis menekan pengeluaran untuk konsumsi (World Bank 2020b).

Merespons dampak pandemi Covid-19 yang beragam antarnegara, antardaerah, dan antarwaktu, diperlukan kebijakan yang tidak seragam (World Bank 2020a). Kelompok yang paling besar dampaknya dirasakan oleh masyarakat miskin karena langsung berkaitan dengan kebutuhan pokok dan utama. Sejak Maret 2020, pemerintah Indonesia sudah merespons keadaan di atas dengan kebijakan memberikan berbagai program jaringan pengaman sosial maupun prakerja. Kebijakan bisa dipilah menjadi dua bagian. Bantuan cepat dan bersifat jangka pendek berupa sembako kepada 1,9 juta RT di Jabodetabek, bantuan sosial tunai di luar Jabodetabek, bantuan listrik gratis kepada 33,6 juta pelanggan, dan subsidi gaji karyawan selama empat bulan dengan nilai Rp37,7 triliun (Yumna et al. 2020). Bantuan jangka pendek berupa sembako dan listrik gratis diberikan untuk mengatasi unsur pokok pangan dan nonpangan masyarakat miskin dan genting, saat kelompok penerima tidak lagi bisa berbuat apa-apa untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Selanjutnya, bantuan jangka pendek prakerja berupa bantuan sosial tunai dan subsidi gaji karyawan diberikan kepada kelompok yang sebenarnya pekerja, tetapi tidak bekerja karena tidak bisa bekerja atau berhenti bekerja karena pandemi. Program jangka menengah berupa BLT dana desa, kartu prakerja untuk pelatihan dan insentif, BLT usaha mikro kecil untuk 1 juta UMK diberikan pada kelompok yang jatuh miskin karena kehilangan kesempatan bekerja, namun dengan pembekalan ketrampilan peluang kerja padat karya diharapkan suatu waktu bisa produktif kembali.

Sejauh ini, pandemi Covid-19 belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir, korban terinfeksi masih terus meningkat. Pemerintah mengeluarkan kebijakan tambahan sebesar Rp405,1 triliun dengan rincian: (1) untuk pemulihan ekonomi nasional Rp150 triliun; (2) untuk insentif perpajakan dan stimulus KUR Rp70,1 triliun; (3) untuk perlindungan sosial Rp110 triliun, dan (4) untuk bidang kesehatan Rp75 triliun (Bappenas 2020). Khusus di sektor pertanian, Kementerian Pertanian melakukan tiga langkah strategis sebagai respons terhadap dampak pandemi berupa (1) *refocusing* kegiatan dan anggaran antisipatif (jangka pendek); (2) mempercepat program padat karya berupa percepatan tanam, pembangunan infrastruktur pertanian, dan

peningkatan kualitas SDM (jangka pendek-menengah); dan (3) menjaga ketersediaan bahan pangan pokok berupa bantuan benih, stabilisasi harga, dan stabilisasi pasokan (jangka pendek-menengah). Respons kebijakan bukan sesuatu yang baru, tetapi dilakukan percepatan sehingga lebih bersifat antipatif terhadap dampak yang ditimbulkan pandemi Covid-19.

Pandemi Covid-19 diprediksi akan memengaruhi aktivitas perekonomian dalam jangka waktu yang lama. Masyarakat dunia diperkirakan akan mengalami resesi dan krisis ekonomi. Dana Moneter Internasional memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2020 akan turun 3% (IMF 2020). Resesi akan mendorong meningkatnya orang miskin baru. Sementara, data BPS (2020b) menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia triwulan I tahun 2020 dibandingkan triwulan I tahun 2019 tumbuh 2,97%. Berbeda sedikit dengan Bank Dunia (2020) yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 hanya akan mencapai 2,1%, tetapi pada skenario terburuk hasil proyeksi menunjukkan dapat turun menjadi -3,5%. Perlambatan ekonomi tersebut pada saat yang sama akan berakibat pada peningkatan kemiskinan (Suryahadi et al. 2020). Sekalipun sejauh ini respons kebijakan mampu memperlambat peningkatan kemiskinan atau memperlambat penurunan pertumbuhan ekonomi, jika pandemi berkepanjangan maka ketahanan negara dan masyarakat menjadi tantangan yang berat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pandemi Covid-19 yang berdampak pada perubahan perilaku dan aktivitas ekonomi telah mendorong peningkatan jumlah dan angka kemiskinan, baik secara nasional, wilayah desa-kota, maupun secara pulau-provinsi. Penurunan pendapatan terjadi akibat peningkatan pengangguran dan menurunnya kesempatan bekerja dan berusaha. Dampak Covid-19 terbesar terjadi di Pulau Jawa, Provinsi DKI Jakarta dan wilayah perkotaan, namun secara keseluruhan tidak mengubah sebaran kemiskinan menurut pulau, tetapi mengubah peta sebaran

kemiskinan menurut sektor ekonomi yang secara berturut-turut berpengaruh kuat pada sektor informal, perdagangan besar dan kecil, jasa (termasuk pariwisata dan transportasi), dan pertanian.

Pandemi Covid-19 berdampak pada kedalaman dan keparahan kemiskinan di mana ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap GK semakin tinggi yang berarti semakin jauh dari GK. Penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin semakin timpang. Dampak pandemi bersifat global, tetapi dampak lebih besar terjadi pada masyarakat miskin, dan ini telah memperlebar terjadinya kesenjangan.

Guna mengatasi guncangan kesehatan, ekonomi, dan sosial yang terjadi sebagai dampak dari pandemi Covid-19, pemerintah melaksanakan program kendali cepat jangka pendek berupa bantuan jaringan pangan sosial pangan yang berfungsi membantu peningkatan konsumsi (sembako, listrik) dan pendapatan (uang). Program jangka menengah juga diberikan berupa kartu prakerja yang dilengkapi dengan pendapatan jangka pendek berupa stimulus insentif pada UMKM dalam bentuk keringanan pajak, penurunan suku bunga pinjaman, penundaan tempo bayar, dan insentif permodalan.

Saran

Dampak pandemi Covid-19 terhadap kemiskinan menunjukkan perkembangan dan sebaran kemiskinan yang beragam sehingga memerlukan mekanisme intervensi penanggulangan yang tidak seragam. Kelompok sasaran sebaiknya dipilah menjadi tiga masa penanganan dampak sebagai berikut.

1. Jangka pendek: program JPS bagi masyarakat miskin yang terdampak berat yang berada pada posisi yang sama dengan kelompok miskin kronis. Bantuan berupa pangan dan keringanan terhadap kebutuhan mendasar nonpangan lainnya. Kebijakan ini dilakukan secara berkala dengan sasaran semakin berkurang secara bertahap.
2. Jangka menengah: program kombinasi peningkatan konsumsi, pendapatan, sekaligus program prakerja kepada masyarakat

miskin usia kerja, pernah bekerja, dan atau potensial bekerja pada saat kondisi pandemi sudah bisa diadaptasi atau diatasi.

3. Jangka panjang: program bantuan modal usaha dan kondisi kondusif untuk kelompok miskin terdampak pandemi yang memiliki asset atau pernah memproduksi. Keringanan mengakses permodalan, infrastruktur penunjang, keringanan harga input, dan penciptaan iklim pasar yang kondusif.

Agar program mencapai sasaran yang tepat berdasarkan kelompoknya dan dilakukan secara efektif dan efisien, maka diperlukan pemutakhiran (*update*) data kependudukan untuk mendapatkan orang, jumlah, dan wilayah sasaran yang sesuai. Pemilahan penerima bantuan akibat dampak pandemi atau akibat lain membutuhkan pemilihan bentuk program yang sesuai. Di samping terus memperbarui data penduduk miskin dan rentan miskin, pemerintah perlu meningkatkan anggaran dan jumlah penerima bansos dan prakerja. Antisipasi ketahanan akibat pandemi berkepanjangan disarankan dilakukan dengan kebijakan kemudahan berusaha bagi masyarakat kecil dan kemudahan investasi bagi sektor swasta yang potensial menggerakkan ekonomi dengan kebiasaan baru yang disiplin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah R. 2020. The last mile problem penurunan kemiskinan [Internet]. [diunduh 2020 Sep 30]. Tersedia dari: <https://www.watyutink.com/opini/The-Last-Mile-Problem-Penurunan-Kemiskinan>
- [Bappenas] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2018. Analisis wilayah dengan kemiskinan tinggi [Internet]. Jakarta (ID): Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. [diunduh 2020 Sep 24]. Tersedia dari: https://www.bappenas.go.id/files/6915/6082/6584/Analisis_Wilayah_dengan_kemiskinan_Tinggi_-_BAPPENAS.pdf
- [Bappenas] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2020. Strategi penanggulangan kemiskinan di tengah pandemi: sebuah tantangan untuk Indonesia. Bahan tayangan pada Geography Talk; 2020 Jun 3.
- [BPS]. Badan Pusat Statistik. 2018. Penghitungan dan analisis kemiskinan makro Indonesia tahun 2018. Jakarta (ID): Badan Pusat Statistik.

- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2019. Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2019. Jakarta (ID): Badan Pusat Statistik.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2020a. Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2020. Jakarta (ID): Badan Pusat Statistik.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2020b. Analisis hasil survei dampak Covid-19 terhadap pelaku usaha. Jakarta (ID): Badan Pusat Statistik.
- Herman. 2020. 22 provinsi alami kenaikan angka kemiskinan akibat Covid-19 [Internet]. [diunduh 2020 Agu 31]. Tersedia dari: <https://www.beritasatu.com/jeanny-aipassa/ekonomi/656063/22-provinsi-alami-kenaikan-angka-kemiskinan-akibat-covid19>
- [IMF] International Monetary Fund. 2020. World economic outlook reports [Internet]. Washington, DC (US): International Monetary Fund; [diunduh Sep 25]. Tersedia dari: [https://www.imf.org/en/Publications/WEO#:~:text=Description%3A%20Global%20growth%20i%20projected%20to%20rise%20from%20an%20estimated,World%20Economic%20Outlook%20\(WEO\)](https://www.imf.org/en/Publications/WEO#:~:text=Description%3A%20Global%20growth%20i%20projected%20to%20rise%20from%20an%20estimated,World%20Economic%20Outlook%20(WEO))
- Izzati RA. 2020. Estimasi dampak pandemi Covid-19 pada tingkat kemiskinan di Indonesia [Internet]. [diunduh 2020 Sep 4]. Tersedia dari: <https://www.smeru.or.id/id/content/estimasi-dampak-pandemi-covid-19-pada-tingkat-kemiskinan-di-indonesia>
- Simatupang P, Dermorejo SK. 2003. Produk domestik bruto, harga dan kemiskinan: hipotesis “*trickle down*” dikaji ulang. Ekon Keuangan Indones. 51(3):291-324.
- Suryahadi A, Izzati RA, Suryadarma D. 2020. The impact of Covid-19 outbreak on poverty: an estimation for Indonesia. Bull Indones Econ Stud. 56(2):175-192. doi:10.1080/00074918.2020.1779390.
- Suryahadi A, Suryadarma D, Sumarto S. 2006. Economic growth and poverty reduction in Indonesia: the effects of location and sectoral components of growth. SMERU Working Paper, August 2006. Jakarta (ID): SMERU Research Institute.
- Tarigan H, Simatupang P, Wahyuni S, Maulana M. 2019. Strategi penanggulangan kemiskinan di pertanian dan perdesaan. Laporan Akhir Penelitian. Bogor (ID): Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
- Todaro MP, Smith SC. 2006. Pembangunan ekonomi. Jilid 2. Ed ke-9. Jakarta (ID): Penerbit Erlangga.

- World Bank. 2020a. Poverty and distributional impact of Covid 19: potential channels of impact and mitigating polities. Washington, DC (US): World Bank.
- World Bank. 2020b. Indonesia economic prospect [Internet]. Washington, DC (US): World Bank; [cited 2020 Sep 25]. Tersedia dari: <https://www.worldbank.org/in/country/indonesia/publication/indonesia-economic-prospect>
- Yusuf AA. 2020. Poverty and distributional impact of Covid-19 Crisis in Indonesia. Presented at WIDER Webinar Series: How is Covid-19 changing development? 2020 May 12. Bandung (ID): SDGs Center, Universitas Padjadjaran.
- Yumna A, Arfyanto H, Bima L, Bachtiar PL. 2020. Jaringan pengamanan sosial dalam krisis Covid-19: apa yang saat ini perlu dilakukan oleh pemerintah. SMERU Catatan Kebijakan No.3/Mar/2020. Jakarta (ID): SMERU Research Institute.